

Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(LAKIP)

DINAS PERHUBUNGAN

2023

KABUPATEN LUWU TIMUR

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 dapat diselesaikan penyusunannya.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, maka setiap berakhirnya tahun anggaran diwajibkan setiap SKPD untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Indikator Kinerja. Laporan ini bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas seseorang atau pemimpin SKPD kepada atasannya, untuk mengetahui akuntabilitas instansi baik dari segi kinerja maupun keuangan dan merupakan laporan pertanggungjawaban SKPD terhadap tugas – tugas yang diembankan kepadanya. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini mungkin masih terdapat kekurangan – kekurangan yang perlu dilakukan perbaikan sehingga laporan ini akan menjadi sempurna, oleh karena itu diharapkan saran dan masukan yang membangun dari semua pihak.

Demikianlah laporan ini dibuat, semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Malili, Januari 2023

KEPALA DINAS,



A.R. SALIM, S. Sos. MM
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP : 196511051987031015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii

BAB I PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum InstansiHal 1
2. Bidang KewenanganHal 1
3. Tugas Pokok dan FungsiHal 2
4. Struktur OrganisasiHal 3

BAB II Perencanaan Kinerja

1. Visi dan MisiHal 6
2. Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Pembngunan.....Hal 6
3. Rencana Kinerja PDHal 11

BAB III Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian Kinerja Hal 14
2. Realisasi Anggaran Hal 44

BAB IV Penutup..... Hal 62

1. Gambaran Umum Instansi

Proses penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik (good governance) merupakan komitmen pelaksanaan pemerintah dengan menjadikan akuntabilitas publik sebagai landasan. Komitmen ini harus didukung oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah yang secara konsisten menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang lebih bermutu, profesional dan akuntabel. Sistem akuntabilitas yang baik menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dalam lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja. Kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan telah bersih dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.

Untuk mewujudkan hal itu maka diperlukan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perhubungan telah menyusun perencanaan strategik yang termasuk di dalamnya visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan dan kegiatan yang realistis untuk mendukung akuntabilitas instansi pemerintah, maka perencanaan strategis yang merupakan awal dalam mengevaluasi kinerja dinas untuk mempertanggungjawabkan perkembangan pembangunan di bidang perhubungan.

2. Bidang dan Kewenangan

Bidang dan kewenangan Dinas Perhubungan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

- 1) Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah;
- 2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

3. Tugas Pokok dan Fungsi

3.1 Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Perhubungan adalah membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

3.2 Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan Lalu Lintas dan Pengujian Kendaraan;
- b. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang Angkutan Jalan;
- c. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pelayaran;
- d. perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
- e. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya..

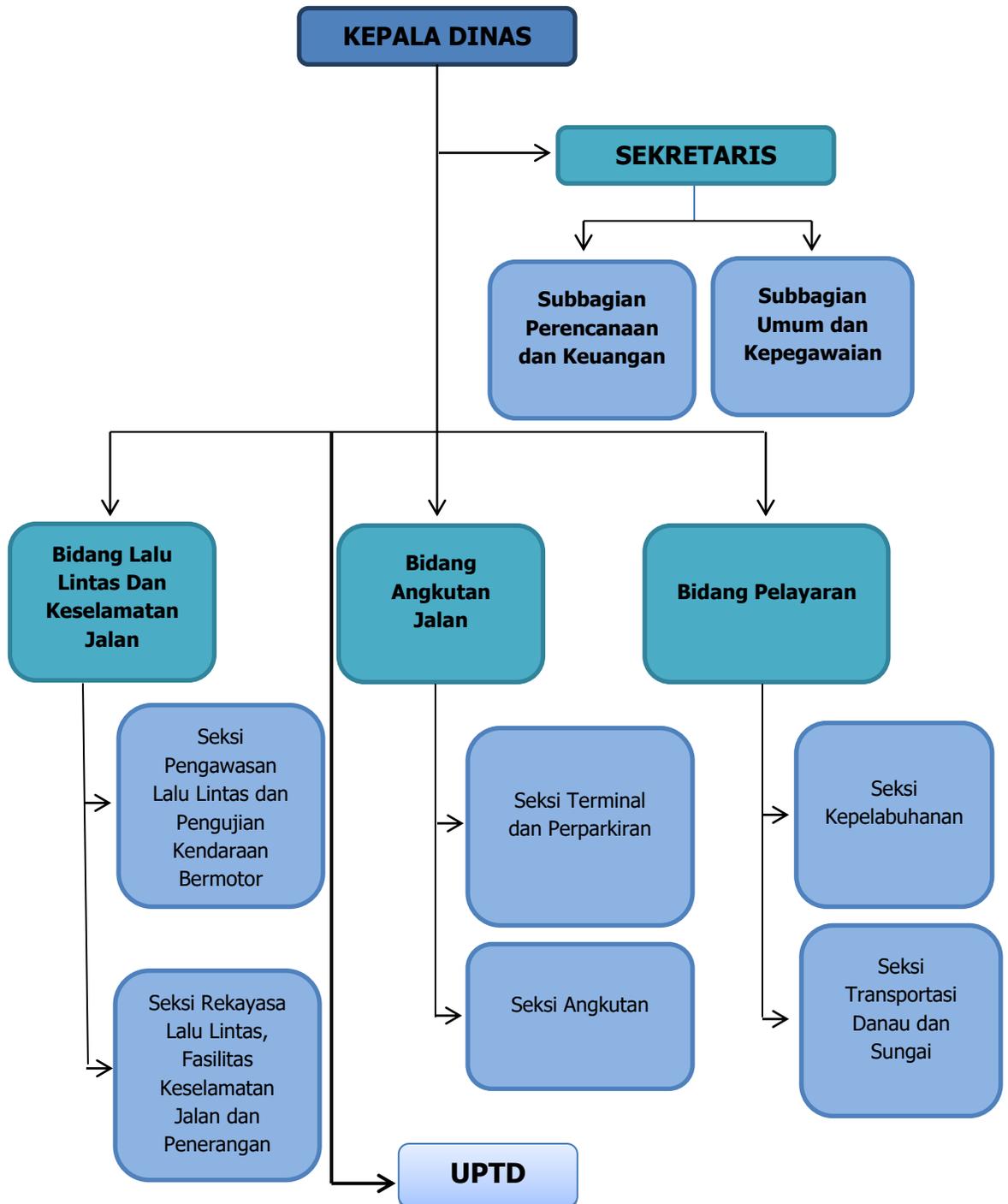
4. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan maka susunan organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas :
Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Lalu Lintas Dan Keselamatan Jalan, terdiri atas :
Seksi Pengawasan Lalu Lintas dan Pengujian Kendaraan Bermotor ; dan
Seksi Rekayasa Lalu Lintas, Fasilitas Keselamatan Jalan dan
Penerangan Jalan Umum.
4. Bidang Angkutan Jalan, terdiri atas :
Seksi Terminal dan Perparkiran;
Seksi Angkutan.
5. Bidang Pelayaran, terdiri atas :
Seksi Kepelabuhanan; dan
Seksi Transportasi Danau dan Sungai.

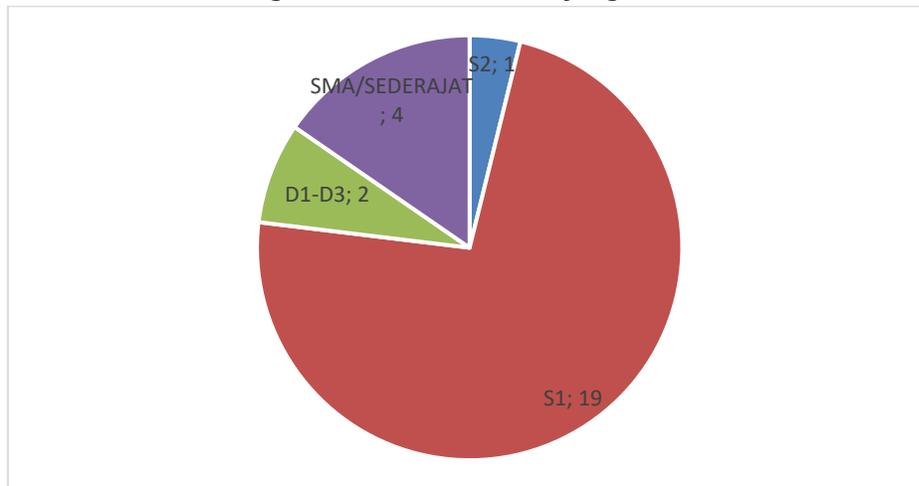
- 6. Unit Pelaksana Teknis; dan
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



Dalam mendukung tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sesuai dengan susunan organisasi diatas, Dinas Perhubungan memiliki pegawai berjumlah 84 orang, terdiri dari 27 PNS dan 63 upah jasa. Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat, golongan dan jabatan dapat lihat pada table sebagai berikut :

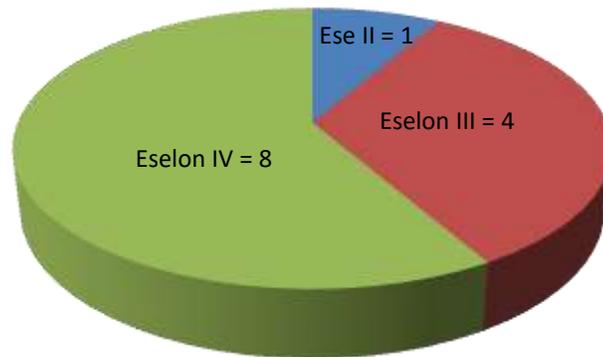
Gambar 1.2
Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Tabel 1.1
Data Pegawai Berdasarkan Pangkat / Golongan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah (org)
1	Pembina Utama Muda, IV/c	1
2	Pembina, IV/a	3
3	Penata Tk.I, III/d	6
4	Penata, III/c	5
5	Penata Muda Tk.I, III/b	4
6	Penata Muda, III/a	2
7	Pengatur, II/d	2
8	Pengatur Muda Tk.I, II/c	2
9	Pengatur Muda, II/b	1

Gambar 1.3
Data Pegawai Berdasarkan Eselon



1. VISI DAN MISI

1.1 Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, visi Dinas Perhubungan haruslah juga mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Periode 2021 – 2026 yaitu :

**“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju
Berlandas Nilai Agama dan Budaya”**

1.2 Misi

Misi merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan agar apa yang telah ditetapkan dapat diwujudkan. Misi Dinas Perhubungan dinyatakan sebagai suatu tugas untuk meningkatkan pelayanan transportasi kepada masyarakat. Dengan pemahaman akan misi, maka dapat diharapkan unsur dalam sistem transportasi mampu berinteraksi untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Adapun misi Dinas Perhubungan mengacu pada 2 misi yaitu:

- Misi 3 { • Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas
- Misi 4 { • Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik

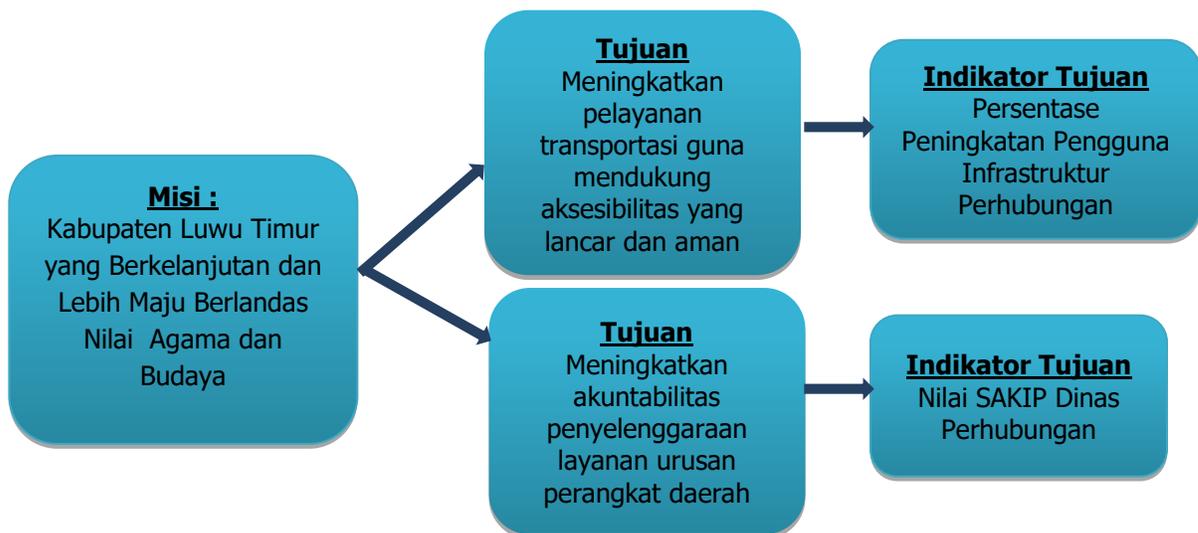
2. TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu tertentu. Sebagai penjabaran dari misi, tujuan harus dapat mewujudkan sesuatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang yang dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif dan diupayakan terfokus pada kostumer. Tujuan memiliki 3 karekteristik yaitu idialistik, jangkauan ke depan dan abstrak. Berdasarkan hal tersebut Dinas Perhubungan menetapkan tujuannya sebagai berikut :

Gambar 2.1

Tujuan RENSTRA Dishub 2021 – 2026



2.2 Sasaran

Tujuan tersebut diatas diharapkan dapat mencapai beberapa sasaran organisasi. Sasaran organisasi ditetapkan dengan menggunakan ukuran kuantitatif sehingga pencapaian dapat diukur dengan jelas. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat, terinci, dapat diukur dan

dicapai. Berdasarkan hal tersebut Dinas Perhubungan menetapkan sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

INDIKATOR KINERJA	FORMULASI INDIKATOR	SAT	TARGET					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
TUJUAN 1: Meningkatkan Pelayanan Transportasi Guna Mendukung Aksesibilitas Yang Lancar Dan Aman								
SASARAN 1: Meningkatnya Kualitas Konektivitas Transportasi								
Rasio Konektivitas Kabupaten	(IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	Rasio	0.30	0.58	0.63	0.67	0.72	0.77
SASARAN 2: Meningkatnya keselamatan dan Keamanan Transportasi								
Persentase angkutan umum yang laik beroperasi	((Jumlah angkutan umum yang memiliki izin laik operasi) / (Jumlah angkutan umum yang seharusnya memiliki izin laik beroperasi)) x 100%)	%	76.35	77.87	79.35	80.76	82.03	83.32
Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi	Jumlah kejadian kecelakaan angkutan tidak laik jalan tahun n / jumlah kejadian kecelakaan angkutan wajib uji tahun n	Rasio	0,00	0,00	0,00	0,27	0,20	0,13
TUJUAN 2: Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Dinas Perhubungan								
SASARAN 2: Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Perhubungan								
Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	Opini yang dikeluarkan oleh Inspektorat terhadap laporan SAKIP tahun-n	Nilai	66,22	70,35	73,24	75,26	80,25	82,55

2.3 Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam RENSTRA diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Adapun Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur akan ditempuh dengan menetapkan kebijakan.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang di tetapkan oleh pihak yang berwenang untuk di jadikan pedoman bagi setiap organisasi, agar adanya keterpaduan dan upaya untuk mencapai Visi dan Misi.

Adapun Strategi dan Kebijakan yang di tetapkan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur adalah :

Tabel 2.2
Strategi dan Kebijakan SKPD

Visi : Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya			
Misi : Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M3)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pelayanan transportasi guna mendukung aksesibilitas yang lancar dan aman	Meningkatnya Kualitas Konektivitas Transportasi	Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana transportasi yang menunjang kelancaran arus transportasi	Penyediaan prasarana transportasi yang menunjang kelancaran arus transportasi dan keselamatan berlalu lintas
			Pemeliharaan prasarana transportasi yang mendukung kontinuitas pelayanan
			Penyediaan dan pemeliharaan sarana angkutan yang aman dan nyaman guna membantu masyarakat mengakses fasilitas publik
	Meningkatnya keselamatan dan Keamanan Transportasi	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan sehingga menciptakan ketertiban dan keselamatan pengoperasian angkutan umum	Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi guna mendapatkan bantuan sarana transportasi
			Peningkatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas angkutan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor pemangku kepentingan (kepolisian, BPTD)
			Peningkatan edukasi / sosialisasi keselamatan angkutan kepada masyarakat

			Pengembangan layanan pengujian kendaraan bermotor yang berbasis IT
Misi : Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik (M4)			
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan guna tercapainya target kinerja dan keuangan serta melaporkannya dengan tertib	Merencanakan dan melaksanakan program / kegiatan secara konsisten mengacu kepada dokumen perencanaan jangka menengah dinas (RENSTRA), dengan harapan seluruh target Bupati – Wakil Bupati yang dibebankan kepada Dinas Perhubungan dapat dicapai dalam kurun 5 tahun;
			Mendorong pegawai yang diberi tanggungjawab kegiatan agar melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan petunjuk dan membuat laporan pertanggungjawaban secara benar dan tepat waktu
			Melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan program / kegiatan. Jika terdapat permasalahan, hal – hal yang menyimpang, deviasi capaian target, agar segera dilakukan perbaikan dan revisi target

3. RENCANA KINERJA SKPD

Seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan hanya dapat dicapai apabila telah disusun, ditetapkan dan dilaksanakannya strategi yang tepat. Strategi yang dibangun ini dilandasi informasi dan data yang relevan dari analisis lingkungan, nilai-nilai yang ada dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Penjabaran strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pokok

3.1 Program

Pada tahun anggaran 2023, Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur telah menyusun 2 Program Urusan Perhubungan dan 1 Program Urusan Penunjang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran dinas, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.3
Program Urusan Perhubungan Tahun 2023

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR	SAT	TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)									
Tersedianya sarana dan prasarana LLAJ yang berdaya guna dan berhasil guna	Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ Yang disediakan (%)	(Jumlah sarana dan prasarana LLAJ yang terbangun/jumlah sarana dan prasarana LLAJ yg seharusnya ada)*80%+(Jumlah rambu lalu lintas yang terpasang/jumlah rambu lalu lintas yang seharusnya ada)*20%	%	45,08%	52,46%	67,37%	79,90%	90,93%	100,00%
Terciptanya lalu lintas angkutan jalan yang aman dan nyaman	Persentase angkutan wajib uji yang laik jalan (%)	Rencana Kendaraan yang lolos uji (laik jalan)/Rencana Jumlah Kendaraan wajib uji	%	94,07%	94,24%	94,41%	94,57%	94,73%	94,88%
	Persentase Kejadian Kecelakaan angkutan wajib uji (%)	(Jumlah kejadian kecelakaan angkutan wajib uji yang tidak laik jalan tahun n/jumlah kejadian kecelakaan angkutan wajib uji tahun n)*100%	%	0	0	0	0,27	0,20	0,13
Program Pengelolaan Pelayaran									

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	FORMULASI INDIKATOR	SAT	TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terciptanya pelayaran kapal yang aman dan nyaman	Persentase Kapal yang laik berlayar di laut (%)	Jumlah kapal yang beralamat Kabupaten Luwu Timur yang memiliki izin layar /jumlah kapal yang berlayar yang beralamat Kabupaten Luwu Timur	%	22,17%	27,17%	31,98%	36,57%	40,86%	45,18%
	Persentase Kapal yang laik berlayar di danau (%)	Jumlah kapal yang beroperasi di danau yang memiliki izin/jumlah kapal yang beroperasi di danau	%	12,50%	25,00%	43,75%	68,75%	87,50%	100,00%
Program Pengelolaan Penerbangan									
Terlaksananya pembangunan dan pengelolaan bandara	Jumlah penumpang angkutan udara (orang)	Jumlah penumpang angkutan udara tahun-n	orang	6137	-	-	-	-	-
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	Jumlah capaian Kinerja Kegiatan/Jumlah Kegiatan	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

3.2 Perencanaan Kinerja

Pada tahun 2023 Dinas Perhubungan telah menetapkan perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja ini ditetapkan menjadi perjanjian kinerja yang merupakan perwujudan komitmen antara Bupati selaku pemberi amanah kepada Kepala SKPD selaku penerima amanah. Dalam setiap perjanjian kinerja yang dibuat, telah ditetapkan indikator yang terukur. Salah satu tujuan dari perjanjian kinerja ini adalah sebagai tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja SKPD.

Adapun perjanjian kinerja tahun 2023 yang dibuat Kepala Dinas Perhubungan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Perhubungan

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Sat	Target
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Meningkatnya Kualitas Konektivitas Transportasi	Rasio Konektivitas Kabupaten	<i>Rasio</i>	<i>0.63</i>
2	Meningkatnya keselamatan dan Keamanan Transportasi	Persentase angkutan umum yang laik beroperasi	%	79,35%
		Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi	Rasio	0
3	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Perhubungan	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	%	73,24

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakannya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pelaporan berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain capaian setiap sasaran, LAKIP ini juga menyajikan analisis efisiensi dan efektifitas yang merupakan perbandingan capaian kinerja input terhadap output kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.

Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur selaku pengemban amanah masyarakat di bidang perhubungan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan. Laporan akuntabilitas kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja diukur dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja pada tahun berjalan. Peraturan Permenpan 53 Tahun 2014 menekankan bahwa LAKIP harus memberikan gambaran capaian kinerja tidak hanya pada tahun berjalan saja tapi harus dibandingkan dengan capaian kinerja tahun – tahun sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tren capaian tiap – tiap program setiap tahun. Sehingga akan didapatkan data program – program yang capaiannya telah mendekati target pada akhir tahun Renstra atau belum. Selain itu dilakukan pula perbandingan capaian kinerja SKPD dengan target kinerja standar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Setiap capaian kinerja akan dilakukan analisis keberhasilan atau kegagalan dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Dari 3 Sasaran Strategis ditetapkan 4 Indikator Kinerja sasaran sebagai ukuran keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023, Indikator Kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rasio Konektivitas Kabupaten
2. Persentase angkutan umum yang laik beroperasi
3. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi
4. Nilai SAKIP Dinas Perhubungan

Tabel A
Hasil Pengukuran Kinerja dari Perjanjian Kinerja Dinas
Perhubungan Tahun 2022

No.	Indikator kinerja	Sat	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio	0,63	0,63	100,00%
2	Persentase angkutan umum yang laik beroperasi	%	79,35%	86,22%	108,66%
	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi	Rasio	0,00%	0,00%	100,00%
3	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	%	73,24	79,8	108,96%

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

I. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Infrastruktur transportasi

Indikator : Rasio Konektivitas Kabupaten

Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan 2021 – 2026 Dinas Perhubungan yang mana telah dilakukan beberapa kali penyesuaian, memiliki sasaran Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah dengan Indikator Kinerja tujuan adalah Rasio Konektivitas. Rasio Konektivitas merupakan persentase wilayah Sumatera Barat yang sudah terlayani oleh moda transportasi baik darat dan laut. Berikut merupakan formulasinya

Berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020

Rasio konektivitas kabupaten $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$

- IK1 (angkutan jalan) = $(\text{Jumlah trayek yang dilayani pd kabupaten/kota} \times \text{bobot trayek})$ dibagi (jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut)
- IK2 (Angkutan sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pd Kabupaten/Kota tsb \times bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada Kabupaten/Kota tersebut)

Keterangan :

IK1 (Angkutan Jalan)

- Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP
- Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu

IK2 (Angkutan sungai, danau, penyeberangan)

- Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil
- Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antara wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu

Bobot angkutan jalan atau sungai, danau dan penyeberangan

1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)
2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan jalan = 50)
3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70)
4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)

Bobot Trayek atau Lintas :

- a. Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi tinggi ($>5x$ dalam seminggu), bobot = 1
- b. Bobot trayek lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), = 0.8
- c. Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), bobot = 0.5

1) IK 1 (Angkutan Jalan)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten} \times \text{bobot trayek}}{\text{Jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten tersebut}} \\ &= \frac{7 \times 1}{15} \\ &= 0,467 \end{aligned}$$

2) IK 2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten} \times \text{bobot lintas}}{\text{jumlah kebutuhan Intas penyeberangan pada kabupaten}} \\ &= \frac{8 \times 1}{8} \\ &= 1 \end{aligned}$$

**Rasio konektivitas Kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) +
(IK2 x Bobot angkutan sungai, danau
dan penyeberangan)**

Note: Bobot angkutan jalan = 70 dan Bobot untuk ASDP = 30

(sesuai dengan Permendagri 18 Tahun 2020)

$$= (0,467 \times 70\%) + (1 \times 30\%)$$

$$= 0,33 + 0,3$$

$$= 0,63$$

Rasio Konektivitas 0,63 artinya sebanyak 0,63 atau 63% wilayah sudah terlayani oleh moda Transportasi baik darat dan penyeberangan.

Dengan nilai rasio konektivitas sebesar 63% berarti hubungan antar wilayah telah ditingkatkan dan kemudahan arus penumpang atau barang dari satu simpul transportasi untuk mencapai simpul lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sitem transportasi yang lancar dan aman bagi masyarakat telah terjadi.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.1
Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio	0,63	0,63	100,00%

Rasio Konektivitas Kabupaten dengan pencapaian target tahun 2023 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 0,63 yang berarti realisasi Rasio konektivitas Kabupaten tercapai pada tahun 2023.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.2

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun 2022, dan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021		Capaian Kinerja Thn 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Thn 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Thn 203 (%)
		Target	Real		Target	Real		Target	Real	
1	2	6	7	8	9	6	8	9	10	11
1	Rasio Konektivitas Kabupaten	0,3	0,3	100%	0,4	0,4	100%	0,63%	0,63%	100%

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Kabupaten Tahun 2023 Dengan Tahun 2022, dan Tahun 2021 menggambarkan bahwa setiap tahunnya target meningkat dan realisasinya sesuai dengan target sehingga capaian kinerja setiap tahun sebesar 100%

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.3

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022		Capaian Kinerja Thn 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Thn 203 (%)
		Target	Real		Target	Real	
1	2	9	6	8	9	10	11
1	Rasio Konektivitas Kabupaten	0,4	0,4	100%	0,63%	0,63%	100%

Untuk capaian kinerja tahun 2022 dan tahun 2023 sebesar 100% yang berarti tidak ada perbedaan capaian

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan target Jangka Menengah

Tabel 3.4

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah 2026

No.	Indikator Kinerja Utama	Sat	Target Renstra 2021-2026	Realisasi Target Sampai 2023	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Rasio Konektivitas Kabupaten	%	0,77	0,63	81,74%

Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan Target jangka menengah Tahun 2021-2026 adalah sebesar 81,74% jika melihat trend yang ada maka Dinas Perhubungan optimis akan mencapai target renstra tersebut.

E. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Standar Nasional

Tabel 3.5

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Standar Nasional

No.	Indikator Kinerja Utama	Sat	Realisasi Target Nasional 2023	Realisasi Target Kabupaten	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Rasio konektivitas Kabupaten	Rasio	0,781	0,63	80,24%

Target Rasio konektivitas Kabupaten untuk wilayah Kabupaten Luwu Timur sebesar 0,63 sedangkan untuk Rasio Konektivitas Dan Aksesibilitas Nasional sebesar 0,781 dimana capaian Kab. Luwu Timur sebesar 80,24 % hal ini karena masih kurangnya trayek angkutan desa dalam wilayah kabupaten Luwu Timur.

Sumber Data terkait tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran Kementerian Perhubungan diperoleh dari Peraturan Menteri

Perhubungan No PM 80 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024, sedangkan untuk data target dan realisasi Kementerian Perhubungan diperoleh dari website http://eperformance.dephub.go.id/index.php/public/capaian_kementerian

F. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Tabel 3.6

Capaian Realisasi Sasaran 1

No	Indikator Kinerja Utama Sasaran 1	Capaian %
1	Rasio konektivitas Kabupaten	100%

1. Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan Kinerja

Penyebab keberhasilan capaian Angkutan umum yang laik beroperasi adalah :

- Pembangunan Terminal Malili dan Terminal Tarengge
Dengan terbangunnya Terminal Malili dan Terminal Tarengge maka diharapkan Segala aktivitas mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan atau barang, serta perpindahan moda angkutan dapat berjalan maksimal, sehingga masyarakat dapat menggunakan fasilitas terminal dan tidak ada lagi aktivitas menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang yang dilakukan di luar Terminal.
- Pengoperasian dan pemeliharaan Bus Sekolah
Dengan adanya 27 unit bus sekolah yang melayani 11 kecamatan di Kabupaten Luwu Timur maka akses anak sekolah untuk pergi dan pulang sekolah lebih mudah dan aman.
- Rekomendasi izin trayek
Dengan adanya rekomendasi izin trayek maka angkutan umum dapat mengurus pembuatan atau perpanjangan izin trayek sehingga semua angkutan umum penumpang yang beroperasi di Kabupaten Luwu timur memiliki trayek tetap
- Pengawasan terhadap trayek yang dilayani
Kegiatan ini dilakukan guna mengetahui seberapa jauh tingkat perkembangan pelayanan angkutan, serta untuk mengetahui faktor penyebab atau hal – hal yang dapat mengganggu pelaksanaan angkutan sehingga dapat diambil langkah – langkah pemecahan masalah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

- Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau Dengan beroperasi dan terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau maka akses pengguna fasilitas pelabuhan akan lebih mudah dan aman
 - Penetapan Trayek Penyeberangan
2. *Analisis Penyebab Kegagalan / Penurunan Kinerja*
 Penyebab kegagalan capaian indikator 1 yaitu :
- angkutan umum yang tidak memperpanjang maupun mengurus izin trayek, dimana hal itu mempengaruhi kepada variabel perhitungan rasio konektivitas
 - maraknya kendaraan plat gantung beroperasi laiknya kendaraan umum yang sah
3. *Alternative Solusi Yang Harus Dilakukan*
 Alternative solusi untuk permasalahan pada Sasaran 1 dengan yaitu :
- Bekerjasama dengan Polres Luwu Timur melakukan pengawasan terhadap kendaraan angkutan umum yang tidak memperpanjang izin trayeknya
 - Memberikan teguran langsung kepada pemilik kendaraan yang tidak memiliki izin trayek namun melakukan aktivitas layaknya angkutan penumpang umum, sehingga hal ini merugikan angkutan penumpang umum lainnya, karena akan mempengaruhi jumlah penumpang yang diangkut serta pendapatan pemilik kendaraan.

G. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut alokasi anggaran serta anggaran perubahan dari sub kegiatan terkait pengawasan angkutan perintis yang menjadi kinerja Rasio konektivitas Kabupaten

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 1

NO	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2023	
				(Rp)	(%)
1	Pembangunan Gedung Terminal	2.971.500.000	2.971.500.000	2.968.412.512,02	99,90%
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	81.320.000	81.320.000	80.822.000	99,39%

NO	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2023	
				(Rp)	(%)
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	28.256.400	28.256.400	18.825.850	66,63%
4	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.321.003.700	2.321.003.700	2.089.892.580	90,04%
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	223.209.000	223.209.000	213.252.306	95,54%
6	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	10.000.000	10.000.000	9.972.000	99,72%
7	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	370.925.500	370.925.500	370.264.400	99,82%

Jika melihat tabel Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 1 maka ada 1 sub kegiatan yang capaian anggrannya hanya sebesar 66,63%, anggaran yang tidak terealisasi tersebut merupakan anggaran jasa petugas parkir yang tidak terpakai karena adanya beberapa petugas parkir yang mengundurkan diri sehingga anggaran tersebut tidak dapat direalisasikan

H. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam rangka menunjang pencapaian kinerja Rasio konektivitas Kabupaten, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

a. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Kegiatan pengelolaan terminal dilakukan melalui Pemeliharaan Terminal yang ada dan Pembangunan Terminal Malili dan Terminal Tarengge, Dengan terbangunnya beberapa fasilitas utama di Terminal Malili dan Tarengge maka diharapkan aktivitas mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan atau barang, serta perpindahan moda angkutan dapat berjalan maksimal, sehingga masyarakat dapat menggunakan fasilitas terminal dan tidak ada lagi aktivitas manikkan dan menurunkan penumpang dan barang yang dilakukan di luar Terminal. Sehingga jumlah orang atau

masyarakat yang menggunakan fasilitas Terminal semakin meningkat setiap tahunnya.

Gambar 3.1
Pembangunan
Terminal Malili &
Terminal Tarengge
Tahun 2023



- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
Penyediaan dan pengelolaan tempat Parkir untuk memenuhi kebutuhan pemilik kendaraan untuk mengurangi parkir liar.
- c. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah siswa siswi yang terangkut pertahunnya, selama tahun 2023 sebanyak 379.600 siswa dan siswi SMP dan SMA Kabupaten Luwu Timur diangkut oleh Bus Sekolah setiap hari. Demi keamanan dan kenyamanan penumpang angkutan sekolah maka dilakukan pemeliharaan rutin terhadap 27 unit bus sekolah melalui Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- d. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
bertujuan untuk mengupayakan penurunan angka kecelakaan dan meningkatkan persentase kendaraan penumpang umum atau angkutan wajib uji yang laik jalan. Sasaran kegiatan ini adalah pemilik dan pengguna kendaraan wajib uji yaitu penumpang umum orang dan barang.
Rasio izin trayek adalah perhitungan yang di dapat dari jumlah izin trayek yang dikeluarkan dibagi jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur. Pada tahun 2023 rasio ijin trayek tidak tercapai karena hanya ada 33 unit kendaraan yang mengurus izin trayek, hal ini karena di Kabupaten Luwu Timur masih kurang Angkutan Pedesaan sementara jumlah penduduk semakin meningkat.

2. Program Pengelolaan Pelayaran

- a. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan guna menunjang aktivitas penyeberangan masyarakat yang menggunakan pelabuhan.

Pada tahun 2023 jumlah penumpang dan barang yang melalui Dermaga meningkat karena pada lintasan dermaga Sorowako ke dermaga Nuha dan lintasan dermaga Timampu ke dermaga Tokalimbo dilayani kapal ferry KMP Opudi dan KMP Pangkilang yang memiliki standar keselamatan dan kelaiklautan kapal, memiliki jadwal yang tetap, pelayanan yang prima serta menjamin keselamatan dan kenyamanan pelayaran. Hal inilah yang menarik minat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi danau Matano dan danau Towuti yang menyebabkan meningkatnya penumpang pada penyeberangan danau Matano dan danau Towuti

II. Sasaran 2 : Meningkatnya keselamatan dan Keamanan Transportasi

Indikator 1 : Persentase angkutan umum yang laik beroperasi

Persentase angkutan umum yang laik beroperasi dengan pencapaian target tahun 2023 sebesar 108,66% dengan realisasi sebesar 86,22% dihitung sesuai dengan jumlah angkutan umum yang memiliki izin laik operasi.

Formulasi perhitungan capaian target indikator 1 :

$$\begin{aligned} &= ((\text{Jumlah angkutan umum yang memiliki izin laik operasi}) / (\text{Jumlah} \\ &\quad \text{angkutan umum yang seharusnya memiliki izin laik beroperasi})) \times \\ &\quad 100\%) \\ &= ((3127/3941) \times 100\%) \\ &= 86,22\% \end{aligned}$$

Indikator 1 mengukur keselamatan dan keamanan dari ketersediaan angkutan umum orang dan barang yang laik beroperasi, meningkatkan keselamatan transportasi angkutan di darat, laut dan danau. Dimana keselamatan dalam bertransportasi dapat terwujud apabila sistemnya (orang, kendaraan dan aturan) dapat menciptakan ketertiban, keamanan dan kenyamanan di kendaraan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dilakukan langkah – langkah melalui pengujian kendaraan bermotor untuk kendaraan

wajib uji dan memfasilitasi pengurusan pas kapal laut dan danau sehingga kapal yang beroperasi memiliki izin operasi

Untuk mewujudkan kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang aman dan selamat ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kendaraan bermotor yang digunakan harus laik jalan. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga sebelum kendaraan dioperasikan di jalan harus mendapat kepastian bahwa kendaraan tersebut telah memenuhi persyaratan dimaksud. Agar dapat diciptakan kondisi pemenuhan terhadap persyaratan di atas, maka dilakukanlah apa yang dinamakan pengujian kendaraan bermotor. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor ini dimaksudkan untuk mengecek apakah kendaraan angkutan penumpang umum dan angkutan barang yang akan dioperasikan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan atau tidak. Kegiatan pengujian kendaraan bermotor dilakukan secara periodik per-setiap 6 (enam) bulan sekali.

Sedangkan untuk mewujudkan lalu lintas kapal di laut dan di danau yang aman, maka dilaksanakan kegiatan peningkatan skill pengemudi kapal dan fasilitasi perijinan kapal

Pada tahun 2023 Capaian target indikator 1 mencapai 108,66% dimana dilakukan pengujian kendaraan dan sebanyak 3.130 unit angkutan penumpang umum dan angkutan barang dianggap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, 16 unit Kapal di danau yang laik berlayar serta 252 unit kapal di laut yang laik berlayar. Capaian ini didukung oleh beberapa faktor terutama pengujian kendaraan yang dilakukan secara efektif, yakni tenaga penguji yang meskipun masih kekurangan personil tetapi dapat bekerja handal dan profesional. Fasilitas dan perlengkapan pengujian yang cukup lengkap melalui pengadaan alat uji sesuai dengan aturan yang berlaku dan pemeliharaan secara rutin serta Kalibrasi terhadap alat pengujian. Perbaikan prosedur dan mekanisme pengujian, serta sistem pembinaan dan pengawasan dari instansi terkait yang berwenang dalam fungsi pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan juga mendukung dalam pencapaian target.

Tabel 3.8
Tabel Capaian Jumlah angkutan umum yang memiliki izin laik operasi

No.	Uraian	Jumlah	Target		Realisasi	
			Yang berizin	%	Yang berizin	%
1	Kendaraan Wajib Uji (Darat)	2987	2820	94,41%	3130	104,79%
2	Kapal di Laut	938	300	31,98%	252	26,87%
3	Kapal di Danau	16	7	43,75%	16	100,00%
	TOTAL	3941	3127	79,35%	3398	86,22%

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase angkutan umum yang laik beroperasi	%	79,35%	86,22%	108,66%

Persentase angkutan umum yang laik beroperasi dengan pencapaian target tahun 2023 sebesar 108,66% dengan realisasi sebesar 86,22%.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.10
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun 2022, dan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021		Capaian Kinerja Thn 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Thn 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Thn 2023 (%)
		Target	Real		Target	Real		Target	Real	
1	Persentase angkutan umum yang laik beroperasi	76,35%	74,82%	97,99%	77,87%	78,49%	100,80%	79,35%	86,22%	108,66%

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Persentase angkutan umum yang laik beroperasi Tahun 2023 Dengan Tahun 2022, dan Tahun 2021 menggambarkan bahwa setiap tahunnya target meningkat, pada tahun 2021 target hanya mencapai 97,99% karena adanya peralihan dari pengguna BUKI KEUR ke Smart Card Blu-E, sehingga dalam masa peralihan itu tidak dilakukan pengujian kendaraan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.11

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022		Capaian Kinerja Thn 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Thn 203 (%)
		Target	Real		Target	Real	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase angkutan umum yang laik beroperasi	77,87%	78,49%	100,80%	79,35%	86,22%	108,66%

Untuk capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100,80% dan Tahun 2023 sebesar 108,66%, ini berarti ada peningkatan capaian dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 7,68%

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan target Jangka Menengah

Tabel 3.12

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah 2026

No.	Indikator Kinerja Utama	Sat	Target Renstra 2021-2026	Realisasi Target Sampai 2023	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase angkutan umum yang laik beroperasi	%	83.32%	86,22%	103,48%

Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan Target jangka menengah Tahun 2021-2026 adalah sebesar 103,48% jika melihat trend yang ada maka Dinas Perhubungan optimis akan mencapai target renstra tersebut.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Tabel 3.13

Capaian Realisasi Sasaran 2 Indikator 1

No	Indikator Kinerja Utama Sasaran 1	Capaian %
1	2	6
1	Persentase angkutan umum yang laik beroperasi	108,66%

1. Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan Kinerja

Penyebab keberhasilan capaian Angkutan umum yang laik beroperasi adalah :

- Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
Pengujian kendaraan bermotor dilakukan 2 kali dalam setahun terhadap 1 unit kendaraan wajib uji. Pada tahun 2023 mulai bulan Januari sampai bulan desember dilakukan 3477 kali pengujian kendaraan bermotor.
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Pemeliharaan terhadap 11 unit alat pengujian untuk mengkalibrasi menguji keakurasian alat yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat dan juga dilakukan penggantian suku cadang pada alat yang sudah tidak dapat beroperasi dengan baik. Alat pengujian yang akurat dapat memastikan kendaraan yang diuji KIR telah aman, nyaman dan laik jalan.
- Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Untuk mendapatkan atau memberikan kondisi lalu lintas yang selancar dan seaman mungkin bagi pergerakan manusia, barang dan jasa dengan kondisi geometrik/jaringan dan lalu lintas yang ada melalui system pengaturan, penataan dan regulasi maka dengan rutin dilaksanakan manajemen dan rekaya lalu lintas

dengan hasilnya adalah rekomendasi yang perlu dilakukan pada ruas jalan tertentu sesuai dengan hasil rekayasa.

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota Berdasarkan peraturan menteri perhubungan nomor PM 13 Tahun 2017 tentang pendaftaran dan kebangsaan kapal, maka setiap pemilik kapal wajib mendaftarkan dan mengukur kapalnya di kantor Syahbandar terdekat. Untuk membantu masyarakat pemilik kapal yang kurang aktif dalam pengurusan perijinan, maka Dinas Perhubungan memfasilitasi pengurusan dokumen pas kecil, dengan cara menjemput bola ke rumah pemilik kapal sesuai dengan data yang telah dimutakhirkan.
- Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau Peningkatan keselamatan untuk transportasi danau diupayakan dengan memfasilitasi pengurusan sertifikat kapal agar kapal tersebut laik berlayar, pada tahun 2023 kapal yang laik berlayar di danau sebanyak 16 unit, selain itu dilakukan Pengawasan terhadap pengoperasian pelabuhan di Danau Towuti dan Danau Matano yang dilakukan secara rutin. Pada tahun ini juga telah dilakukan kerjasama dengan pihak BPTD dan Kementerian perhubungan untuk melakukan pengukuran dan pendaftaran kapal yang masih sementara dalam pengurusan kelengkapan dokumen persyaratan oleh pihak pemilik kapal

2. Analisis Penyebab Kegagalan / Penurunan Kinerja

Penyebab kegagalan capaian indikator 1 yaitu :

- Kurangnya Sumber Daya manusia khususnya tenaga pengujian kendaraan bermotor, kondisi saat ini hanya terdapat 3 orang yang bersertifikat sesuai dengan jenjang masing-masing, dimana 2 orang berstatus PNS dan 1 orang upah jasa, jika dibandingkan dengan jumlah pengujian yang dilakukan setiap harinya, maka dapat menjadi salah satu faktor penghambat pencapaian target kinerja. sehingga diharapkan adanya penambahan personel Pengujian Kendaraan Bermotor
- Angkutan umum yang tidak tertib dalam mengurus dan memperpanjang bukti lulus uji
- Pada tahun 2023 jumlah kapal yang telah difasilitasi sebanyak 252 unit dari target 300 unit atau sebesar 84,02% hal ini terjadi karena adanya keterbatasan SDM yang dimiliki oleh Kantor

Syahbandar sehingga tidak dapat melakukan pengukuran kapal terhadap kapal yang telah difasilitasi pengurusan ijinnya

- Pemilik kapal yang kurang aktif dan cenderung malas melakukan pengurusan surat izin berlayar

3. *Alternative Solusi Yang Harus Dilakukan*

Alternative solusi untuk permasalahan pada Sasaran 1 dengan yaitu :

- Bekerjasama dengan Polres Luwu Timur melakukan pengawasan terhadap kendaraan angkutan umum yang tidak memperpanjang izin bukti lulus uji
- Mengajukan ke BKPSDM Kabupaten Luwu Timur untuk membuka formasi penerimaan CPNS atau PPPK untuk Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor.
- Aparatur Dinas Perhubungan telah melakukan kerjasama dengan pihak BPTD dan Kementerian perhubungan untuk melakukan pengukuran dan pendaftaran kapal yang masih sementara dalam pengurusan kelengkapan dokumen persyaratan oleh pihak pemilik kapal.
- Meningkatkan koordinasi dengan stake holder terkait agar seluruh permohonan pengurusan pas kecil dapat ditindaklanjuti

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut alokasi anggaran serta anggaran perubahan dari sub kegiatan terkait pengawasan angkutan perintis yang menjadi kinerja Rasio konektivitas Kabupaten

Tabel 3.14

Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 2 Indikator 1

NO	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2023	
				(Rp)	(%)
1	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	207.198.000	207.198.000	199.836.000	96,45%
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	128.000.000	128.000.000	112.000.000	87,50%
3	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan	381.584.000	381.584.000	378.239.155	99,12%

NO	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2023	
				(Rp)	(%)
	Kabupaten/Kota				
4	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	16.005.500	16.005.500	15.879.700	99,21%
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	241.896.900	241.896.900	237.625.292	98,23%
6	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	370.925.500	370.925.500	370.264.400	99,82%

Jika melihat tabel Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 2 indikator 1 maka terlihat rata-rata capaian realisasi keuangan sebesar 96,72%

G. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam rangka menunjang pencapaian kinerja Rasio konektivitas Kabupaten, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

a. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Angkutan umum yang aman dan nyaman dan laik jalan adalah angkutan umum yang melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor secara berkala melalui Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Adapun Persentase kendaraan angkutan yang aman dan nyaman sebesar 110,99% meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 dilakukan uji kendaraan terhadap 3130 unit kendaraan dan dinyatakan lulus uji.

b. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Untuk mendapatkan atau memberikan kondisi lalu lintas yang selancar dan seaman mungkin bagi pergerakan manusia, barang dan jasa dengan kondisi geometrik/jaringan dan lalu lintas yang ada melalui system pengaturan, penataan dan regulasi maka dengan rutin dilaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan hasilnya adalah rekomendasi yang perlu dilakukan pada ruas jalan tertentu sesuai dengan hasil rekayasa.

2. Program Pengelolaan Pelayaran

- a. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Berdasarkan peraturan menteri perhubungan nomor PM 13 Tahun 2017 tentang pendaftaran dan kebangsaan kapal, maka setiap pemilik kapal wajib mendaftarkan dan mengukur kapal di kantor Syahbandar terdekat. Untuk membantu masyarakat pemilik kapal yang kurang aktif dalam pengurusan perijinan, maka Dinas Perhubungan memfasilitasi pengurusan dokumen pas kecil, dengan cara menjemput bola ke rumah pemilik kapal sesuai dengan data yang telah dimutakhirkan.
- b. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan guna menunjang aktivitas penyeberangan masyarakat yang menggunakan pelabuhan.
Peningkatan keselamatan untuk transportasi danau diupayakan dengan memfasilitasi pengurusan sertifikat kapal agar kapal tersebut laik berlayar, pada tahun 2023 kapal yang laik berlayar di danau sebanyak 16 unit, selain itu dilakukan Pengawasan terhadap pengoperasian pelabuhan di Danau Towuti dan Danau Matano yang dilakukan secara rutin. Pada tahun ini juga telah dilakukan kerjasama dengan pihak BPTD dan Kementerian perhubungan untuk melakukan pengukuran dan pendaftaran kapal yang masih sementara dalam pengurusan kelengkapan dokumen persyaratan oleh pihak pemilik kapal

Gambar 3.2
Pengawasan Aktivitas
Pelabuhan



Sasaran 2 : Meningkatnya keselamatan dan Keamanan Transportasi
Indikator 2 : Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi

Rasio kejadian kecelakaan transportasi untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi adalah Perbandingan kejadian kecelakaan angkutan tidak laik jalan dengan jumlah kecelakaan angkutan wajib uji.

Formulasi perhitungan capaian target indikator 2 :

$$= \frac{\text{Jumlah kejadian kecelakaan angkutan tidak laik jalan tahun } n}{\text{jumlah kejadian angkutan wajib uji tahun } n}$$

$$= ((0/15) \times 100\%)$$

$$= 0$$

Indikator 2 mengukur keselamatan dan keamanan dari Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi angkutan wajib uji. Semakin rendah Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi maka makin sedikit kendaraan wajib uji yang kecelakaan karena kendaraan tersebut tidak laik jalan.

Tabel 3.15
Tabel Jumlah Kejadian Kecelakaan Tahun 2023

No	Uraian	2023
1	Jumlah Kecelakaan	15
2	Jumlah Kecelakaan Angkutan Umum	6
3	Jumlah Kecelakaan Angkutan Umum Barang	9
4	Jumlah Kecelakaan Karena Kondisi Rusak	0
5	Jumlah Kecelakaan Karena Karena Rambu-Rambu Lalu Lintas	0
6	Jumlah Kecelakaan Karena Kondisi Kendaraan	0

F. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.16
 Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 1 Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi	%	0%	0%	100%

Persentase angkutan umum yang laik beroperasi dengan pencapaian target tahun 2023 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 0%. Target Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi adalah target menurun jadi semakin kecil realisasi semakin baik.

G. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.17

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 1 Tahun 2023 Dengan Tahun 2022, dan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021		Capaian Kinerja Thn 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Thn 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Thn 203 (%)
		Target	Real		Target	Real		Target	Real	
1	2	6	7	8	9	6	8	9	10	11
1	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian tahun 2021, 2022 dan 2023 adalah 100% hal ini karena indikator ini merupakan indikator baru hasil dari perbaikan setelah coaching dengan tim dari Kemenpan RI, jadi tidak ada penetapan target untuk tahun 2021-2023 namun untuk realisasi sebesar 0% atau selama tahun 2021, 2022 dan 2023 tidak ada kendaraan wajib uji yang mengalami kecelakaan yang disebabkan kendaraan tersebut tidak laik jalan tetapi karena faktor manusia atau pengemudinya serta faktor lingkungan atau cuaca.

H. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.18

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022		Capaian Kinerja Thn 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Thn 203 (%)
		Target	Real		Target	Real	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi	0%	0%	100%	0%	0%	100%

Untuk capaian kinerja tahun 2022 dan tahun 2023 sebesar 100% yang berarti tidak ada perbedaan capaian

I. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan target Jangka Menengah

Tabel 3.19

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah 2026

No.	Indikator Kinerja Utama	Sat	Target Renstra 2021-2026	Realisasi Target Sampai 2023	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi	%	0,13	0	200%

Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan Target jangka menengah Tahun 2021-2026 adalah sebesar 200% jika melihat trend yang ada maka Dinas Perhubungan optimis realisas tersebut akan tetap bertahan sampai akhir renstra.

J. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Standar Nasional

Tabel 3.20

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Standar Nasional

No.	Indikator Kinerja Utama	Sat	Realisasi Target Nasional 2023	Realisasi Target Kabupaten	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Dalam 1 Juta Keberangkatan	Rasio	17,26	0,000015	199,99%

Untuk target Nasional tentang Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kementerian Perhubungan menetapkan target Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Dalam 1 Juta Keberangkatan, sehingga jika dibandingkan

dengan target Kabupaten Luwu Timur maka perhitungannya adalah membandingkan Jumlah Kecelakaan Transportasi angkutan wajib uji dibagi 1.000.000 keberangkatan

$$\begin{aligned} &\text{Rumus Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Dalam 1 Juta Keberangkatan} \\ &= \text{Jumlah Kejadian Kecelakaan}/1.000.000 \text{ keberangkatan} \\ &= 15/1.000.000 \\ &= 0,000015 \end{aligned}$$

Bila dilihat perbandingannya maka Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Dalam 1 Juta Keberangkatan di Kabupaten Luwu Timur lebih kecil karena dalam lingkup yang kecil.

K. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Tabel 3.21

Capaian Realisasi Sasaran 2 Target 2

No	Indikator Kinerja Utama Sasaran 1	Capaian %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>6</i>
1	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi	100%

1. Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan Kinerja

Penyebab keberhasilan capaian Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi adalah :

- Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang meliputi Pemasangan Penerangan Jalan Umum di Kecamatan Towuti, pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan pemasangan marka jalur sepeda di ruas jalan Kecamatan Malili dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan secara rutin dilakukan pemeliharaan penerangan jalan umum, pemeliharaan rambu lalu lintas atau perlengkapan jalan berupa pemeliharaan terhadap traffic light dan warning light, pemeliharaan papan nama jalan yang ada di Kabupaten Luwu Timur untuk mengoptimalkan penggunaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran

lalu lintas dan angkutan jalan. Pemeliharaan terhadap 21 unit halte bus sekolah juga dilakukan secara rutin.

- Membangun Koordinasi dan Komunikasi dengan instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.

Agar terjadi keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Analisis Penyebab Kegagalan / Penurunan Kinerja

Penyebab kegagalan capaian indikator 1 yaitu :

- Angkutan umum yang tidak tertib berlalu lintas
- Belum optimalnya Koordinasi dan Komunikasi stake holder terkait dalam menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan

3. Alternative Solusi Yang Harus Dilakukan

Alternative solusi untuk permasalahan pada Sasaran 1 dengan yaitu :

- Bekerjasama dengan Polres Luwu Timur melakukan pengawasan terhadap kendaraan angkutan umum yang tidak memperpanjang izin bukti lulus uji
- Meningkatkan koordinasi dengan stake holder terkait melalui Forum Lalu Lintas dan angkutan Jalan

L. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut alokasi anggaran serta anggaran perubahan dari sub kegiatan terkait pengawasan angkutan perintis yang menjadi kinerja Rasio konektivitas Kabupaten

Tabel 3.22

Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 2 Indikator 2

NO	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2023	
				(Rp)	(%)
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	389.480.000	389.480.000	380.597.087,49	97,72%
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	4.000.298.250	4.000.298.250	3.803.307.955	95,08%

Jika melihat tabel Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 2 indikator 2 maka terlihat rata-rata capaian realisasi keuangan sebesar 96,4%

M. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam rangka menunjang pencapaian kinerja Rasio konektivitas Kabupaten, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

a. Kegiatan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini meliputi pemasangan perlengkapan jalan dan pemeliharaan perlengkapan jalan berupa penerangan jalan umum warning light, traffic light dan halte bus sekolah dengan capaian 100% dimana perlengkapan jalan yang disediakan berfungsi dengan baik, uraian sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang meliputi Pemasangan Penerangan Jalan Umum di Kecamatan Towuti, pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan pemasangan marka jalur sepeda di ruas jalan Kecamatan Malili dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan
- b) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan secara rutin dilakukan pemeliharaan penerangan jalan umum, pemeliharaan rambu lalu lintas atau perlengkapan jalan berupa pemeliharaan terhadap traffic light dan warning light, pemeliharaan papan nama jalan yang ada di Kabupaten Luwu Timur untuk mengoptimalkan penggunaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemeliharaan terhadap 21 unit halte bus sekolah juga dilakukan secara rutin

III.Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas dan pencaipan kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Perhubungan
Indikator : Nilai SAKIP Dinas Perhubungan

Indikator Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Diukur berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah yang dilaksanakan pada tahun n.

Penilaian Evaluasi SAKIP SKPD merupakan penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan yang dievaluasi setiap tahunnya. Penilaian akuntabilitas kinerja SKPD dinilai oleh Inspektorat dan dilaporkan dalam bentuk hasil penilaian atas kinerja organisasi dan kinerja keuangan organisasi. Bentuk akhir dari SAKIP adalah dalam bentuk laporan kinerja yaitu LAKIP

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran 3 bahwa capaian Akuntabilitas Kinerja Organisasi di Dinas Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 berdasarkan Nilai SAKIP dapat dijelaskan pada uraian sebagai berikut:

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.23
 Capaian Kinerja Sasaran 3 Indikator 1 Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	Nilai	73,24	79,80	108,96%

Realisasi SAKIP tahun 2023 merupakan hasil penilaian dari SAKIP Tahun 2022 dengan nilai adalah BB (79,80). Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada renstra 2021 – 2026 yaitu B (73,24), maka dapat diketahui persentase capaian nilai LAKIP Tahun 2022 adalah sebesar 108,96%, ini berarti dalam skala penilaian Sangat Baik.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.24

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 1 Tahun 2023 Dengan Tahun 2022, dan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021		Capaian Kinerja Thn 2021 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Thn 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Thn 2023 (%)
		Target	Real		Target	Real		Target	Real	
1	2	6	7	8	9	6	8	9	10	11
1	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	66,22	69,01	104,21%	70,35	72,78	103,45%	73,24	79,80	108,96%

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian tahun 2021 sebesar 104,21%, capaian Tahun 2022 sebesar 103,45% dan capaian Tahun 2023 adalah sebesar 108,96%.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.25

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022		Capaian Kinerja Thn 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Thn 2023 (%)
		Target	Real		Target	Real	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	70,35	72,78	103,45%	73,24	79,80	108,96%

Untuk capaian kinerja tahun 2022 sebesar 103,45% dan Tahun 2023 sebesar 108,96%, ini berarti ada peningkatan capaian dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 5,51%

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan target Jangka Menengah

Tabel 3.26

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah 2026

No.	Indikator Kinerja Utama	Sat	Target Renstra 2021-2026	Realisasi Target Sampai 2023	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	%	82,55	79,80	96,67%

Dari tabel di atas capaian kinerja Nilai SAKIP Dinas Perhubungan jika dibandingkan dengan target jangka menengah telah mencapai 96,67% Jika melihat trend yang ada maka Dinas Perhubungan optimis akan mencapai target yang telah ditetapkan di akhir tahun renstra.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Tabel 3.27

Capaian Realisasi Sasaran 3

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian %
1	2	3
1	Persentase capaian kinerja program Dinas Perhubungan	108,96%

1. Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan Kinerja

Penyebab keberhasilan capaian indikator sasaran 32 dengan nilai sebesar 108,96 yaitu :

- Adanya rapat – rapat evaluasi yang dilakukan dalam rangka monitoring capaian – capaian kinerja yang dilakukan
- Adanya upaya percepatan capaian kinerja agar dapat terlaksana dengan baik

- Perencanaan yang matang didalam menyusun suatu program / kegiatan yang terkait dengan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan.
- Penetapan indikator kinerja yang tepat, terukur dan dapat dicapai.
- Pengawasan dan evaluasi terhadap semua kegiatan, terutama yang rutin dilaksanakan setiap tahun.
- Adanya Koordinasi yang intens baik internal di Dinas Perhubungan maupun eksternal dengan OPD Mitra (Inspektorat, Bapelitbangda, Bagian Organisasi)

2. *Analisis Penyebab Kegagalan / Penurunan Kinerja*

Penyebab kegagalan capaian indikator sasaran 3 yaitu :

- Untuk realisasi tahun 2023 tidak ada permasalahan, realisasi ini merupakan hasil penilaian dari SAKIP Tahun 2022 dengan nilai melebihi target yaitu BB (79,80)

3. *Alternative Solusi Yang Harus Dilakukan*

Alternative solusi untuk permasalahan pada Sasaran 3 dengan yaitu :

- Meningkatkan Pengawasan dan evaluasi terhadap semua kegiatan, terutama yang rutin dilaksanakan setiap tahun

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut alokasi anggaran serta anggaran perubahan dari sub kegiatan terkait Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Tabel 3.28

Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 3

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2023	
				(Rp)	(%)
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.351.700	85.351.700	84.604.575	99,12%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.365.700	24.365.700	24.038.620	98,66%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2023	
				(Rp)	(%)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.952.800	1.952.800	1.878.270	96,18%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.252.000	3.252.000	3.128.150,00	96,19%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.781.200	55.781.200	55.559.535	99,60%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.043.176.225	3.043.176.225	3.018.031.666	99,17%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.006.913.325	3.006.913.325	2.982.818.256	99,20%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	36.262.900	36.262.900	35.213.410	97,11%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.056.200	19.056.200	18.836.870	98,85%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.056.200	19.056.200	18.836.870	98,85%
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	10.585.800	10.585.800	10.336.950	97,65%
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.585.800	10.585.800	10.336.950	97,65%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	72.872.900	72.872.900	65.694.520	90,15%
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.352.900	7.352.900	7.194.520	97,85%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65.520.000	65.520.000	58.500.000	89,29%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	579.595.300	579.595.300	575.904.942	99,36%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.798.000	6.798.000	6.798.000	100,00 %

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2023	
				(Rp)	(%)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.636.700	5.636.700	4.790.990	85,00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.868.600	37.868.600	37.860.000	99,98%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.430.000	19.430.000	17.251.800	88,79%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.220.000	8.220.000	7.700.000	93,67%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.450.000	9.450.000	9.440.000	99,89%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	492.192.000	492.192.000	492.064.152	99,97%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	63.250.000	63.250.000	41.140.000	65,04%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.250.000	63.250.000	41.140.000	65,04%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.151.325	141.151.325	131.462.997	93,14%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.366.100	23.366.100	21.386.600	91,53%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.485.225	51.485.225	47.526.397	92,31%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	66.300.000	66.300.000	62.550.000	94,34%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.305.000	165.305.000	163.236.450	98,75%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.000.000	26.000.000	25.998.000	99,99%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	103.850.000	103.850.000	102.968.450	99,15%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2023	
				(Rp)	(%)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.660.000	15.660.000	14.520.000	92,72%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.795.000	19.795.000	19.750.000	99,77%

Jika melihat tabel Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 2 indikator 1 maka terlihat rata-rata capaian realisasi keuangan sebesar 96,72%

G. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam rangka menunjang pencapaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, yaitu dengan adanya kegiatan rapat – rapat evaluasi yang dilakukan dalam rangka monitoring capaian – capaian kinerja yang dilakukan, serta tindak lanjut yang dilakukan atas permasalahan yang ada.

A. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Tahun 2023 Dinas Perhubungan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2023		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Urusan Perhubungan	15.551.021.700	14.988.175.807,51	96,38%	562.845.892	3,62%	562.845.892	3,62%	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.180.344.450	4.109.248.970	98,30%	71.095.480	1,70%	71.095.480	1,70%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.351.700	84.604.575	99,12%	747.125	0,88%	747.125	0,88%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.365.700	24.038.620	98,66%	327.080	1,34%	327.080	1,34%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.952.800	1.878.270	96,18%	74.530	3,82%	74.530	3,82%	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.252.000	3.128.150,00	96,19%	123.850	3,81%	123.850	3,81%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.781.200	55.559.535	99,60%	221.665	0,40%	221.665	0,40%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.043.176.225	3.018.031.666	99,17%	25.144.559	0,83%	25.144.559	0,83%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.006.913.325	2.982.818.256	99,20%	24.095.069	0,80%	24.095.069	0,80%	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2023		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36.262.900	35.213.410	97,11%	1.049.490	2,89%	1.049.490	2,89%	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.056.200	18.836.870	98,85%	219.330	1,15%	219.330	1,15%	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.056.200	18.836.870	98,85%	219.330	1,15%	219.330	1,15%	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	10.585.800	10.336.950	97,65%	248.850	2,35%	248.850	2,35%	
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.585.800	10.336.950	97,65%	248.850	2,35%	248.850	2,35%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	72.872.900	65.694.520	90,15%	7.178.380	9,85%	7.178.380	9,85%	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.352.900	7.194.520	97,85%	158.380	2,15%	158.380	2,15%	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65.520.000	58.500.000	89,29%	7.020.000	10,71%	7.020.000	10,71%	Uang Kontribusi Bimtek
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	579.595.300	575.904.942	99,36%	3.690.358	0,64%	3.690.358	0,64%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.798.000	6.798.000	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.636.700	4.790.990	85,00%	845.710	15,00%	845.710	15,00%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.868.600	37.860.000	99,98%	8.600	0,02%	8.600	0,02%	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2023		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.430.000	17.251.800	88,79%	2.178.200	11,21%	2.178.200	11,21%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.220.000	7.700.000	93,67%	520.000	6,33%	520.000	6,33%	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.450.000	9.440.000	99,89%	10.000	0,11%	10.000	0,11%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	492.192.000	492.064.152	99,97%	127.848	0,03%	127.848	0,03%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	63.250.000	41.140.000	65,04%	22.110.000	34,96%	22.110.000	34,96%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.250.000	41.140.000	65,04%	22.110.000	34,96%	22.110.000	34,96%	Belanja Gorden tidak terealisasi karena kesalahan rekening
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141.151.325	131.462.997	93,14%	9.688.328	6,86%	9.688.328	6,86%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.366.100	21.386.600	91,53%	1.979.500	8,47%	1.979.500	8,47%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.485.225	47.526.397	92,31%	3.958.828	7,69%	3.958.828	7,69%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	66.300.000	62.550.000	94,34%	3.750.000	5,66%	3.750.000	5,66%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.305.000	163.236.450	98,75%	2.068.550	1,25%	2.068.550	1,25%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.000.000	25.998.000	99,99%	2.000	0,01%	2.000	0,01%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	103.850.000	102.968.450	99,15%	881.550	0,85%	881.550	0,85%	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2023		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.660.000	14.520.000	92,72%	1.140.000	7,28%	1.140.000	7,28%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.795.000	19.750.000	99,77%	45.000	0,23%	45.000	0,23%	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	10.747.854.850	10.261.065.145,51	95,47%	486.789.704	4,53%	486.789.704	4,53%	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4.389.778.250	4.183.905.042,49	95,31%	205.873.208	4,69%	205.873.208	4,69%	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	389.480.000	380.597.087,49	97,72%	8.882.913	2,28%	8.882.913	2,28%	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	4.000.298.250	3.803.307.955	95,08%	196.990.295	4,92%	196.990.295	4,92%	Sisa Tagihan Listrik PJU
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	3.052.820.000	3.049.234.512,02	99,88%	3.585.488	0,12%	3.585.488	0,12%	
	Pembangunan Gedung Terminal	2.971.500.000	2.968.412.512,02	99,90%	3.087.488	0,10%	3.087.488	0,10%	Sisa Tender
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	81.320.000	80.822.000	99,39%	498.000	0,61%	498.000	0,61%	
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	28.256.400	18.825.850	66,63%	9.430.550	33,37%	9.430.550	33,37%	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2023		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	28.256.400	18.825.850	66,63%	9.430.550	33,37%	9.430.550	33,37%	Belanja yang tidak terealisasi adalah belanja jasa, karena tidak ada petugas parkir yang di angkat
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	335.198.000	311.836.000	93,03%	23.362.000	6,97%	23.362.000	6,97%	
	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	207.198.000	199.836.000	96,45%	7.362.000	3,55%	7.362.000	3,55%	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	128.000.000	112.000.000	87,50%	16.000.000	12,50%	16.000.000	12,50%	Sisa kontrak pemeliharaan
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	397.589.500	394.118.855	99,13%	3.470.645	0,87%	3.470.645	0,87%	
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	381.584.000	378.239.155	99,12%	3.344.845	0,88%	3.344.845	0,88%	Sisa kontrak pengadaan Radio SSB
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	16.005.500	15.879.700	99,21%	125.800	0,79%	125.800	0,79%	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.321.003.700	2.089.892.580	90,04%	231.111.120	9,96%	231.111.120	9,96%	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2023		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.321.003.700	2.089.892.580	90,04%	231.111.120	9,96%	231.111.120	9,96%	Sisa belanja BBM bus sekolah
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	223.209.000	213.252.306	95,54%	9.956.694	4,46%	9.956.694	4,46%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	223.209.000	213.252.306	95,54%	9.956.694	4,46%	9.956.694	4,46%	Sisa gaji upah jasa
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	622.822.400	617.861.692	99,20%	4.960.708	0,80%	4.960.708	0,80%	
	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	241.896.900	237.625.292	98,23%	4.271.608	1,77%	4.271.608	1,77%	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan	241.896.900	237.625.292	98,23%	4.271.608	1,77%	4.271.608	1,77%	Sisa BBM Kapal dan Tabung Pemadam Kebakaran

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN SD 31 DESEMBER 2023		SELISIH		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kabupaten/Kota								
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	380.925.500	380.236.400	99,82%	689.100	0,18%	689.100	0,18%	
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	10.000.000	9.972.000	99,72%	28.000	0,28%	28.000	0,28%	
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	370.925.500	370.264.400	99,82%	661.100	0,18%	661.100	0,18%	

B. LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN KINERJA INSTANSI

Tabel 3.14
Pencapaian Sasaran Kinerja Instansi Tahun 2023

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	
				I		II		III		IV					
				3		4		5		6					
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
-															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah (%)	100 %	4.180.344.450	100,0 %	481.531.856	100,0 %	1.454.150.072	100 %	596.843.116	100 %	1.576.723.926	100,0 %	4.109.248.970	100,0 %	98,30 %
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	100 %	85.351.700	30 %	4.999.200	17 %	16.202.175	30 %	10.220.000	23 %	53.183.200	100 %	84.604.575	100,0 %	99,12 %

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	
				I		II		III		IV					
				3		4		5		6					
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2	24.365.700	-	-	1	6.759.900	1	2.500.000		14.778.720	2	24.038.620	100,00%	98,66%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2	1.952.800	-	-			1		1	1.878.270	2	1.878.270	100,00%	96,18%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	2	3.252.000	1	960.000		555.600			1	1.612.550	2	3.128.150	100,00%	96,19%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	10	55.781.200	4	4.039.200	2	8.886.675	2	7.720.000	2	34.913.660	10	55.559.535	100,00%	99,60%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara	95%	3.043.176.225	20%	365.144.285	20%	1.211.251.741	20%	445.760.339	35%	995.875.301	95%	3.018.031.666	100,00%	99,17%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		
				I		II		III		IV						
				3		4		5		6						7
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	dengan baik (%)															
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	27	3.006.913.325	27	365.144.285	27	1.198.876.741	27	441.080.339	27	977.716.891	27	2.982.818.256	100,00%	99,20%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	18	36.262.900	4	-	5	12.375.000	4	4.680.000	5	18.158.410	18	35.213.410	100,00%	97,11%	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (%)	100%	19.056.200	25%	-	25%	5.750.000	25%	2.300.000	25%	10.786.870	100%	18.836.870	100,00%	98,85%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	
				I		II		III		IV					
				3		4		5		6					
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)	4	19.056.200	1		1	5.750.000	1	2.300.000	1	10.786.870	4	18.836.870	100,00%	98,85%
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD (%)	95%	10.585.800	20,0%	-	25,0%	2.850.000	25,0%	1.140.000	25,0%	6.346.950	95,00%	10.336.950	100,00%	97,65%
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun (Dokumen)	4	10.585.800	1		1	2.850.000	1	1.140.000	1	6.346.950	4	10.336.950	100,00%	97,65%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	95%	72.872.900	20%	7.133.800	25%	19.168.820	25%	8.620.000	25%	30.771.900	95%	65.694.520	100,00%	90,15%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			
				I		II		III		IV							
				3		4		5		6						7	
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan (Laporan)	12	7.352.900	3	1.513.800	3	1.823.820	3		3		3	3.856.900	12	7.194.520	100,00%	97,85%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Orang)	5	65.520.000		5.620.000	2	17.345.000	1	8.620.000	2	26.915.000	5	58.500.000			100,00%	89,29%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)	95%	579.595.300	20%	73.354.550	25%	135.918.350	25%	99.930.682	25%	266.701.360	95%	575.904.942	100,00%	99,36%		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)	5	6.798.000	5	990.000	5	1.772.000	5		5	4.036.000	5	6.798.000			100,00%	100,00%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	
				I		II		III		IV					
				3		4		5		6					
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (Unit)	8	5.636.700	8	-	8		8		8	4.790.990	8	4.790.990	100,00%	85,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	2	37.868.600	2	5.250.000	2	11.665.000	2	6.000.000	2	14.945.000	2	37.860.000	100,00%	99,98%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)	3	19.430.000	3	2.836.800	3	3.525.000	3	650.000	3	10.240.000	3	17.251.800	100,00%	88,79%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eksamplar)	72	8.220.000	18	1.370.000	18	2.055.000	18	1.370.000	18	2.905.000	72	7.700.000	100,00%	93,67%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	30	9.450.000	7	1.000.000	8	2.300.000	8		7	6.140.000	30	9.440.000	100,00%	99,89%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	
				I		II		III		IV					
				3		4		5		6					
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	150	492.192.000	35	61.907.750	40	114.601.350	40	91.910.682	35	223.644.370	150	492.064.152	100,00%	99,97%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)	95%	63.250.000	-	-	-	-	-	-	95%	41.140.000	95%	41.140.000	100,00%	65,04%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)	4	63.250.000							3	41.140.000	3	41.140.000	75,00%	65,04%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	95%	141.151.325	20%	17.095.021	25%	31.197.486	25%	21.184.595	25%	61.985.895	95%	131.462.997	100,00%	93,14%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	1200	23.366.100	300	350.000	300	9.102.500	300		300	11.934.100	1200	21.386.600	100,00%	91,53%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		
				I		II		III		IV						
				3		4		5		6						7
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	an (Surat)															
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	24	51.485.225	6	10.745.021	6	11.344.986	6	6.534.595	6	18.901.795	24	47.526.397	100,00%	92,31%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)	6	66.300.000	6	6.000.000	6	10.750.000	6	14.650.000	6	31.150.000	6	62.550.000	100,00%	94,34%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	95%	165.305.000	20%	13.805.000	25%	31.811.500	25%	7.687.500	25%	109.932.450	95%	163.236.450	100,00%	98,75%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang	1	26.000.000	1	5.550.000	1	1.855.500	1	6.850.000	1	11.742.500	1,00	25.998.000	100,00%	99,99%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		
				I		II		III		IV						
				3		4		5		6						7
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dipelihara (unit)															
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	10	103.850.000	10	7.405.000	10	27.036.000	10	137.500	10	68.389.950	10	102.968.450	100,00%	99,15%	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	38	15.660.000	9	850.000	9	2.920.000	10	700.000	10	10.050.000	38	14.520.000	100,00%	92,72%	
Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	2	19.795.000	2	-	2		2		2	19.750.000	2	19.750.000	100,00%	99,77%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	
				I		II		III		IV					
				3		4		5		6					
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			4.180.344.450	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										99,62 %	98,293 %
				Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana LLAJ Yang disediakan (%)	61,12 %	10.747.854.850		1.371.840.203		1.565.345.468		995.648.278	61,12 %	6.328.231.197	61,12 %	10.261.065.146	100,00 %	95,47 %
	Persentase angkutan wajib uji yang laik jalan (%)	94,24 %		28,79 %		28,79 %		23,60 %		23,60 %		104,78 %	-	111,18 %	0,00 %
Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	persentase perengkapan jalan yang berfungsi dengan baik (%)	100 %	4.389.778.250	15 %	803.343.203	10 %	848.993.071		574.684.478	75 %	1.956.884.290	100,00 %	4.183.905.042	100,00 %	95,31 %
Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perengkapanjalan yang disediakan (jenis)	2	389.480.000		-					2	380.597.087	2	380.597.087	100,00 %	97,72 %

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	
				I		II		III		IV					
				3		4		5		6					
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang dipelihara (Unit)	48	4.000.298.250	10	803.343.203	6	848.993.071		574.684.478	32	1.576.287.203	48	3.803.307.955	100,00%	95,08%
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah orang (L/P) yang terangkut melalui terminal (Orang)	222.795	3.052.820.000	50.930	6.080.000	66.870	43.337.000	53.480	-	59.296	2.999.817.512	230.576	3.049.234.512	103,49%	99,88%
Pembangunan Gedung Terminal	Persentase capaian bangunan terminal (%)	72,32%	2.971.500.000		-		29.890.000			72,32%	2.938.522.512,0	72,32%	2.968.412.512,02	100,00%	99,90%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal yang di pelihara/direhabilitasi (unit)	3	81.320.000	3	6.080.000	3	13.447.000	3		3	61.295.000	3,00	80.822.000	100,00%	99,39%
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah titik parkir yang diselenggarakan / diusahakan (Titik)	15	28.256.400	5	-	5	6.639.600	5	-		12.186.250	15	18.825.850	100,00%	66,63%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	
				I		II		III		IV					
				3		4		5		6					
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan titik parkir (Kali)	250	28.256.400	62		62	6.639.600	63		63	12.186.250	250	18.825.850	100,00%	66,63%
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan wajib Uji yang laik jalan (unit)	2820	335.198.000	860	81.000.000	860	9.745.000	705	6.000.000	705	215.091.000	3.130	311.836.000	110,99%	93,03%
	Jumlah kendaraan yang diuji (unit)	2987		860		860		705		705		3.130	-	104,79%	0,00%
Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum (kali)	3431	207.198.000	860	81.000.000	860	9.745.000	969	6.000.000	788	103.091.000	3.477	199.836.000	101,34%	96,45%
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana PKB yang dipelihara (Unit)	11	128.000.000	11		11		11		11	112.000.000	9	112.000.000	81,82%	87,50%
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi manajemen lalu lintas yang	22	397.589.500	5	46.040.000	5	121.075.230	6	49.495.000	6	177.508.625	22	394.118.855	100,00%	99,13%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		
				I		II		III		IV						
				3		4		5		6						7
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	dikeluarkan (Rekomendasi)															
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan manajemen rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan (Kali)	18	381.584.000	4	43.780.000	4	117.894.680	5	48.055.000	5	168.509.475	18	378.239.155	100,00%	99,12%	
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Lalu Lintas dan angkutan jalan yang dilaksanakan yang responsive gender(kali)	4	16.005.500	1	2.260.000	1	3.180.550	1	1.440.000	1	8.999.150	4	15.879.700	100,00%	99,21%	
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang (L/P) yang terangkut angkutan umum yang diusahakan oleh pemda (orang)	313200	2.321.003.700	94.900	407.387.000	94.900	482.389.250	94.900	334.648.800	94.900	865.467.530	379.600	2.089.892.580	121,20%	90,04%	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	
				I		II		III		IV					
				3		4		5		6					
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah angkutan yang disediakan (unit)	0	2.321.003.700	407.387.000	482.389.250	334.648.800	865.467.530	-	2.089.892.580	0,00%	90,04%				
	Jumlah kendaraan yang dimanfaatkan dan dipelihara (unit)	27		27	27	27	27	27	27	100,00%	0,00%				
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio ijin trayek (%)	0,011	223.209.000	0,011	27.990.000	0,011	53.166.317	0,011	30.820.000	0,011	101.275.989	100%	213.252.306	100,00%	95,54%
	Persentase kepemilikan KIR angkutan Wajib Uji (%)	5,76%						0,00%		1,04%	-	100,00%	0,00%		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9=8/3x100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan perizinan angkutan (KIR dan Izin Trayek) (Kali)	24	223.20 9.000	6	27.990.0 00	6	53.166.3 17	6	30.820.0 00	6	101.275. 989	24	213.252. 306	100,0 0%	95,5 4%
												-	-	0,00%	0,00%
			10.747.85 4.850	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										99,80 9313 %	95,4 7%
				Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
												0,00 %	-	0,00%	0,00%
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Kapal yang laik berlayar di laut (%)	31, 98 %	622.82 2.400	8,0 0%	38.520.0 00	16, 00 %	141.390. 050	24, 00 %	121.812. 342	26, 87 %	316.139. 300	26,8 7%	617.861. 692	84,02 %	99,2 0%
	Persentase Kapal yang laik berlayar di danau (%)	43, 75 %		12, 50 %		12, 50 %		12, 50 %		43, 75 %		43,7 5%	-	100,0 0%	0,00 %

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	
				I		II		III		IV					
				3		4		5		6					
1	2	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kapal yang laik beroperasi di laut (unit)	300	241.89 6.900	75	10.310.0 00	75	61.389.8 50	75	52.238.3 42	27	113.687. 100	252	237.625. 292	84,00 %	98,2 3%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan kawasan pelabuhan laut Lampia dan pelayanan kapal motor BANAWA NUSANTARA ke Lokasi Wisata (Kali)	24	241.89 6.900	6	10.310.0 00	6	61.389.8 50	6	52.238.3 42	6	113.687. 100	24	237.625. 292	100,0 0%	98,2 3%
	Jumlah kapal yang difasilitasi pengurusan izin (1 tahun) (Unit)	250		75		75		75		27		252	-	100,8 0%	0,00 %

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	
				I		II		III		IV					
1	2	3		4		5		6		7		8		9=8/3x100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			622.822.400		38.520.000		141.390.050		121.812.342		316.139.300				
		15.551.021.700		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM								99,77 %	96,381%		
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		

1. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), yang tersusun ini merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur selama tahun 2023. Media ini juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan di masa-masa mendatang.

Dengan selesainya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Tahun 2023, yang disusun dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan Penetapan Kinerja sebagai tanda suatu kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam satu tahun. Secara umum kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 dapat dikategorikan sangat Baik dengan nilai rata – rata capaian indikator kinerja sasaran yaitu 104,40 %.

Berdasarkan uraian dan analisis kinerja dari belanja langsung sebagaimana diungkapkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa capaian Kinerja Dinas Perhubungan telah terealisasi fisiknya mencapai 99,77 % dan akuntabilitas keuangan mencapai 96,38%, namun perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk masa yang akan datang dalam penyempurnaan - penyempurnaan Kinerja Dinas Perhubungan, khususnya Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia maupun pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang.

Terhadap kondisi tersebut, strategi di masa mendatang yang perlu dikembangkan adalah:

1. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan dengan senantiasa mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
2. (RPJMD) / Renstra yang telah disusun dan disepakati bersama.
3. Meningkatkan responsibilitas aparatur terhadap segala permasalahan yang timbul, sehingga ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan

pemerintahan dapat ditekan/ menurun.

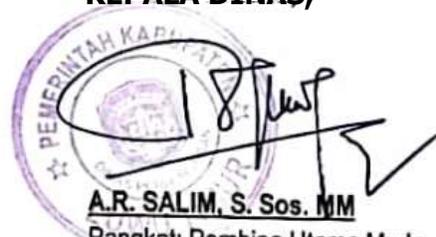
4. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi di tingkat manajerial, guna pencapaian kinerja yang lebih baik.
5. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur untuk menunjang pencapaian target kinerja dinas secara maksimal.

2. SARAN

Walaupun demikian dalam pelaksanaan masih banyak kendala yang dihadapi sehingga dalam pelaksanaan tugas sehari – hari dan pengembangan pembangunan diperlukan adanya peran serta dari pihak terkait, baik instansi pemerintah, maupun badan usaha yang terlibat dalam bidang perhubungan. Dengan adanya dukungan dan kesungguhan dari semua pihak untuk melaksanakan perencanaan yang lebih baik di masa yang akan datang sesuai dengan program – program Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur.

Malili, Januari 2024

KEPALA DINAS,



A.R. SALIM, S. Sos. MM

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP : 196511051987031015